

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari penelitian di bank bjb syariah KCP Sumedang sebagai berikut :

1. Kondisi pembiayaan bermasalah dan hapus buku di Bank BJB Syariah KCP Sumedang cukup mempengaruhi laba dan kinerja Bank secara individual dan konsolidasi dengan Cabang Induk. Dengan dilakukannya proses dan strategi penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah terdapat perbaikan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 baik secara rasio NPF dan Posisi Hapus Buku yang dapat diakuisisi menjadi laba tambahan serta menambah kinerja keuangan bank bjb Syariah KCP Sumedang.
2. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan pemulihan pembiayaan bermasalah (Non Performing Finance) dan pembiayaan hapus buku (Write Off) di BJB Syariah KCP Sumedang agar terakuisisi menjadi laba dilakukan dengan strategi yang telah terkonsep dengan baik. Pada prinsipnya penerapan teori dan kombinasi langkah penyelamatan penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat digambarkan pada konsep strategi pada Gambar IV. 4 pada Bab. IV.
3. Cara melakukan optimalisasi laba Bank BJB Syariah KCP Sumedang dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah NPF dan WO dengan tujuan untuk mengurangi penyisihan cadangan kerugian dan menjadi laba serta meningkatkan kinerja, bank bjb Syariah KCP Sumedang melakukan langkah-langkah teknis penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah secara berkesinambungan dengan action step yang telah diatur dengan baik berdasarkan teori dan praktek dengan siklus strategi penyelesaian pada Gambar IV.5 pada Bab IV.

B. Rekomendasi

Laba merupakan angka keuntungan yang paling diharapkan dari setiap aktifitas bisnis perbankan syariah selain keberlangsungan bisnis yang dilakukan. Namun dalam perjalanannya perbankan syariah yang merupakan intermediasi nasabah penyimpan dana dan kegiatan usaha penyaluran dana berupa pembiayaan terdapat risiko yang mungkin dan pasti timbul yaitu pembiayaan bermasalah.

Laba yang diperoleh melalui current business perbankan syariah bersumber dari pendapatan penyaluran dana (produk pembiayaan), jasa/ijarah atas layanan dan produk bank (Fee Based Income) dan koreksi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / CKPN serta Pemulihan/Recovery Pembiayaan Hapus Buku (Write Off).

Optimalisasi laba dapat dilakukan melalui penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk mengupayakan koreksi kerugian dan pendapatan hapus buku. Optimalisasi laba melalui penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di bank bjb syariah KCP Sumedang berhasil dilakukan dengan cara secara konsisten melakukan upaya langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Strategi dalam melakukan Optimalisasi laba melalui penyelesaian pembiayaan bermasalah NPF dan WO yang dilakukan di bank bjb syariah berdasarkan data yang diperoleh peneliti dapat dikatakan berhasil dilakukan. Terbukti pada tahun 2019 perolehan laba dari koreksi CKPN dan Recovery WO mencapai angka sebesar Rp. 672 jutaan sehingga mendapatkan laba optimal akhir tahun sebesar Rp. 4,637 Milyar. Pada tahun 2020 perolehan laba dari koreksi CKPN dan Recovery WO sebesar Rp. 700 jutaan sehingga mendapatkan laba optimal sebesar Rp. 5,752 Milyar, dan pada tahun 2021 perolehan laba dari koreksi CKPN dan Recovery WO sebesar Rp. 533 jutaan sehingga laba optimal yang diperoleh sebesar Rp. 5,089 Milyar.

Setiap perbankan syariah akan mendapatkan risiko pada pembiayaan bermasalah/macet sehingga diperlukan upaya konsisten, khusus dan fokus

dalam melakukan upaya penyelesaian, baik secara persuasif maupun dengan cara penekanan melalui pihak ketiga (Balai Lelang / Balai Peradilan) yang diperbolehkan dalam rangka membangun proses bisnis yang baik dan menguntungkan bagi pihak nasabah dan pihak bank serta stake holder.

Kesehatan suatu bank dilihat dari tingkat risiko yang diperoleh dari setiap profil risiko yang melekat pada bisnis perbankan syariah. Penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah adalah hal yang patut dilakukan oleh setiap perbankan syariah dalam rangka memperbaiki profil risiko bank dan penertiban terhadap nasabah bermasalah yang berniat tidak baik.

Selain itu, sehubungan dengan kondisi resesi perekonomian akibat pandemi covid 19 menyebabkan usaha perbankan mengalami stagnansi bahkan mengalami perburukan karena adanya penurunan kondisi-kondisi usaha nasabah yang mendapatkan fasilitas pembiayaan, namun pemerintah membantu dengan menerapkan kebijakan stimulus ekonomi melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan kebijakan counter cyclical pemerintah dengan memberikan keringanan pajak selama pandemi serta peran perbankan dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan selama pandemi covid 19 dapat menolong stabilitas keuangan nasabah pembiayaan berdasarkan POJK yang diberlakukan. Oleh karena itu, untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional seluruh Stakeholders ikut ambil peran dan memanfaatkan stimulus serta kebijakan regulasi dalam memperbaiki kualitas nasabah pembiayaan di perbankan syariah agar NPF terjaga dalam kategori sehat.

C. Saran

Untuk menjaga kualitas pembiayaan Bank bjb Syariah agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah dalam rangka memitigasi risiko pembiayaan macet, maka Bank bjb Syariah harus menerapkan Early Warning System melalui 3 cara :

1. Menentukan Komite Pembiayaan dalam setiap keputusan pembiayaan dengan kewenangan memutus setiap exposure berdasarkan jenjang omset dan jabatan pemutus guna menghindari/mitigasi pemberian

pembiayaan kepada nasabah yang sesuai/tepat jumlah, tepat guna dan tepat waktu.

2. Memperkuat kualitas pengikatan akad pembiayaan dan pengikatan agunan yang merupakan second way out dalam setiap pembiayaan agar ketika terjadi pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan melalui proses dibawah tangan maupun melalui proses hukum.
3. Menetapkan kebijakan dan solusi dalam melakukan monitoring pembiayaan nasabah yang sedang berjalan agar memitigasi risiko nasabah melakukan payment default (gagal bayar) atau wanprestasi. Diperlukan cara penanganan nasabah pembiayaan agar menjaga disiplin pembayaran angsuran/kewajiban pengembalian modal/pembiayaan kepada bank.

